

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai negara yang sebagian besar penduduknya adalah muslim, Indonesia berpotensi untuk menjadi *leader* dalam pengembangan pasar keuangan syariah secara global. Pemenuhan kebutuhan keuangan terhadap kegiatan ekonomi dilakukan melalui berbagai sumber pembiayaan.<sup>1</sup> Pembiayaan oleh pemerintah, swasta dan sosial dijadikan sebagai tumpuan untuk menggerakkan sektor ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Industri jasa keuangan merupakan salah satu sarana lainnya dalam memperoleh pembiayaan bagi perekonomian.<sup>2</sup> Thomson Reuters melalui rilis *Islamic Finance Development Indicators (IFDI)* pada tahun 2019 memosisikan Indonesia di peringkat empat dari peringkat sepuluh di tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan adanya *roadmap* pengembangan ekonomi dan keuangan syariah beserta rangkaian regulasi pemerintah yang diikuti dengan kenaikan total aset keuangan syariah di Indonesia sebesar 5% dengan nilai 86 miliar dolar AS menjadi penentu kenaikan peringkat Indonesia di dalam indeks tersebut.

Dari aspek pembiayaan yang diberikan oleh industri jasa keuangan pada tahun 2019 terjadi peningkatan 9,74% menjadi Rp408,89 triliun

---

<sup>1</sup> Bank Indonesia, *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2019*, (Jakarta: BI, 2019), hlm. 46

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 47

dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp373,59 triliun. Pembiayaan perbankan tentunya masih memiliki porsi terbesar dengan 89,60% dibandingkan dengan porsi pembiayaan yang diberikan oleh pelaku industri keuangan syariah yang lainnya. Total *outstanding* untuk pembiayaan perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) pada akhir tahun 2019 mencapai Rp3,66 triliun. Porsi pembiayaan tersebut mencapai 6,36% dari total kredit perbankan sepanjang tahun 2019 sebesar Rp5.759 triliun, dan yang terus meningkat pangsa pembiayaan setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir.<sup>3</sup>

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.<sup>4</sup> Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>5</sup>

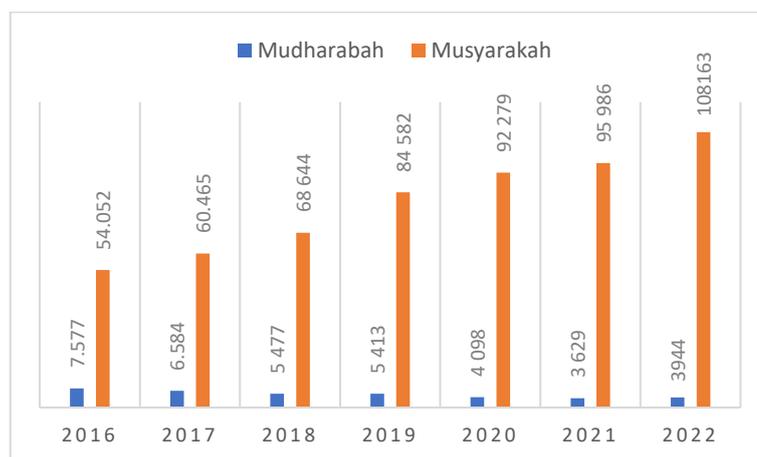
---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 48

<sup>4</sup> Ismail. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 31

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998*, (Jakarta: Lembaga Negara, 1998), hlm. 5

Berikut merupakan data jenis akad pembiayaan dengan skema bagi hasil Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2018-2023:



Sumber: SPS (Statistik Perbankan Syariah), Agustus 2023<sup>6</sup>

### Gambar 1.1 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad - Bank Umum Syariah

Gambar 1.1 menjelaskan pembiayaan *musyarakah* pada periode tahun 2018-2023 merupakan akad dengan skema bagi hasil (*profit sharing*) yang paling banyak digunakan dan diminati serta tiap tahun perkembangannya semakin meningkat. Pembiayaan bagi hasil pada sistem keuangan Islam merupakan bentuk produk perbankan syariah yang bertujuan untuk membiayai suatu usaha produktif dan halal. Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan

<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah (SPS)”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>. Diakses tanggal 26 Agustus 2023

modalnya sesuai dengan kesepakatan dan bagi hasil atas usaha bersama di berikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti pada *Annual Report* Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) ternyata terdapat masalah berkenaan dengan penurunan pos keuangan. Aset yang dimiliki pada tahun 2017 meningkat dari Rp7,44 milyar menjadi Rp7,71 milyar dan pada tahun 2018 berkurang menjadi Rp6,74 milyar.<sup>8</sup> Akan tetapi, di tahun 2017 pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan dari Rp830,65 milyar menjadi Rp819,85 milyar. Kemudian di tahun 2018 saat aset mengalami penurunan, pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan menjadi Rp1,13 triliun. Padahal ketika total aset mengalami peningkatan, maka seharusnya pembiayaan *musyarakah* ikut mengalami kenaikan.<sup>9</sup> Fenomena penurunan aset ketika pembiayaan bagi hasil mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya dapat disebabkan oleh pendapatan *base income* di luar pembiayaan yang mengalami kenaikan atau penurunan serta dapat dipengaruhi oleh jumlah kenaikan atau penurunan permintaan pembiayaan dari masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Ismail. *Perbankan Syariah...*, hlm. 146

<sup>8</sup> Bank Jabar Banten Syariah (BJBS), *Annual Report Tahun 2018-2022*, <https://www.bjbsyariah.co.id/laporan>. Diakses pada 26 Agustus 2023

<sup>9</sup> Artha Yudha Prama, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Total Aset Bank Syariah Di Indonesia Periode Penelitian 2010-2014*, (Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, 2015)

<sup>10</sup> Wawancara dengan Teguh Prakoso, *Brach Operation and Service Manager* Bank Syariah Indonesia, pada tanggal 02 Januari 2024

Berikut merupakan data perkembangan aset dan pembiayaan *musyarakah* Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) Periode 2016-2023:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Aset dan Pembiayaan *Musyarakah***  
**Bank Jabar Banten Syariah**

<b>Tahun</b>	<b>Aset</b>	<b>Pembiayaan <i>Musyarakah</i></b>
2016	Rp 7.441,650	Rp 830,650
2017	Rp 7.713,560 ↑	Rp 819,850 ↓
2018	Rp 6.741.449 ↓	Rp 1.131.772 ↑
2019	Rp 7.723.201 ↑	Rp 1.540.921 ↑
2020	Rp 8.884.354 ↑	Rp 1.693.440 ↑
2021	Rp 10.358.850 ↑	Rp 2.026.941 ↑
2023	Rp 12.445.811 ↑	Rp 2.464.254 ↑

Sumber: Bank Jabar Banten Syariah, 2023<sup>11</sup>

Berdasarkan tabel 1.1 dapat di simpulkan bahwa terdapat penurunan dan peningkatan pembiayaan *musyarakah*. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kondisi makro perekonomian Indonesia. Makroekonomi sebagai faktor eksternal merupakan faktor yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.<sup>12</sup> Dalam mengendalikan dinamika perekonomian yang mengalami penurunan dan pertumbuhan ekonomi, perlu diterapkan kebijakan moneter oleh otoritas moneter yaitu Bank Indonesia melalui instrumen berupa penurunan tingkat bunga, tingkat inflasi dan nilai tukar uang (kurs).<sup>13</sup> Selain itu indikator utama dalam makroekonomi adalah pendapatan nasional. Salah satu konsep yang penting dalam pengukuran pendapatan nasional adalah Produk Domestik Bruto (PDB).<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Bank Jabar Banten Syariah (BJBS), *Annual Report Tahun 2018-2022*, <https://www.bjbsyariah.co.id/laporan>. Diakses pada 26 Agustus 2023

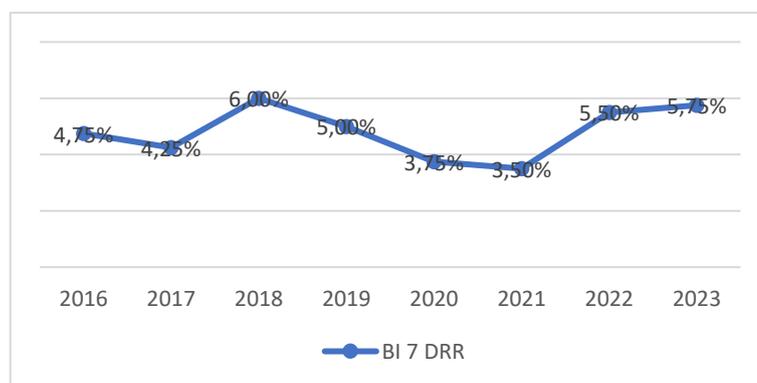
<sup>12</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 212

<sup>13</sup> Imamudin Yuliadi, *Teori Ekonomi Makro Islam*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 70

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 49

Pada pertengahan 2016, Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan baru sebagai pengganti suku bunga acuan yang lama yaitu *BI Rate*. Instrumen *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR)* dipakai sebagai suku bunga kebijakan baru karena dianggap lebih cepat mempengaruhi kondisi pasar uang, perbankan dan sektor riil.<sup>15</sup> Bagi bank syariah, *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR)* hanya dijadikan sebagai acuan dalam penentuan persentase bagi hasil ataupun margin keuntungan. Jika *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR)* bagi bank konvensional melonjak tinggi, maka persentase bagi hasil di bank syariah dapat dianggap lebih rendah dari bank konvensional. Oleh karenanya, nasabah di bank konvensional tentunya akan berpindah kepada bank syariah sehingga dapat meningkatkan alokasi pembiayaan di bank syariah.

Berikut merupakan perkembangan *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR)* Periode 2016-2023:



Sumber: Bank Indonesia, 2023<sup>16</sup>

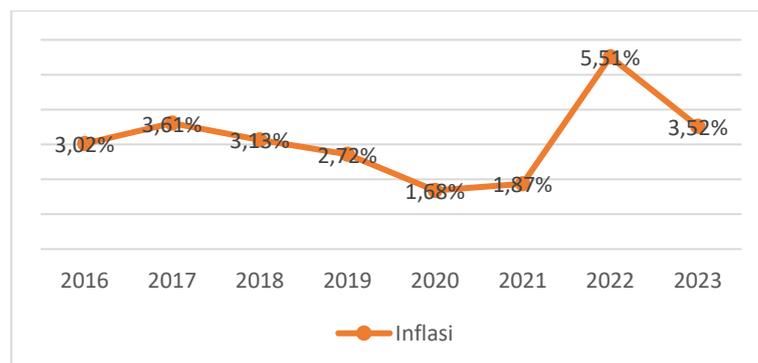
**Gambar 1.2**  
**Perkembangan *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* Periode 2016-2023**

<sup>15</sup> Bank Indonesia, *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/bi-7day-rr/default.aspx>. Diakses pada Tanggal 26 Agustus 2023

<sup>16</sup> Bank Indonesia, *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/bi-7day-rr/default.aspx>. Diakses pada Tanggal 26 Agustus 2023

Pada gambar 1.2 memperlihatkan bahwa pada tahun 2016 BI 7-Days (*Reverse*) Repo Rate (BI7DRR) berada pada angka 4,75% kemudian turun di tahun 2017 menjadi 4.25%. BI 7-Days (*Reverse*) Repo Rate (BI7DRR) pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 6.00% dan turun kembali pada tahun 2019 menjadi 5.00%. Pada tahun 2020 sampai 2021 turun menjadi 3.50% dan naik kembali pada tahun 2023 menjadi 5.50%. Perihal tersebut dapat menimbulkan perbankan syariah akan menghadapi kondisi akibat *Displaced Commercial Risk* yaitu efek perpindahan dana dari perbankan syariah ke perbankan konvensional sebab terdapatnya perbandingan keuntungan yang didapat ketika terdapat pergantian tingkatan suku bunga.

Variabel makroekonomi yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah tingkat inflasi. Berikut merupakan data perkembangan inflasi di Indonesia Periode 2016-2023:



Sumber: Bank Indonesia, 2023<sup>17</sup>

**Gambar 1.3**  
**Perkembangan Inflasi Indonesia Periode 2016-2023**

<sup>17</sup> Bank Indonesia, *Inflasi*, <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx>. Diakses pada Tanggal 26 Agustus 2023

Pada gambar 1.3 memperlihatkan inflasi di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Inflasi yang rendah dan stabil dapat menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Nahar dan Sarker menyatakan dimana semakin tinggi tingkat inflasi, maka tingkat pembiayaan yang diperlukan juga tinggi. Pada penelitiannya dimana Nahar dan Sarker meneliti lebih dari satu negara yang terdapat bank syariah, hasilnya yaitu tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bank syariah.<sup>18</sup>

Variabel makroekonomi selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah nilai kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika. Kurs merupakan pertukaran dari satu mata uang ke mata uang lainnya dan digunakan dalam bertransaksi.<sup>19</sup> Jika kurs tinggi, maka harga barang dari luar negeri akan relatif murah dan harga barang domestik akan mahal, jika nilai kurs melemah terhadap mata uang negara lain, maka barang produksi atau jasa yang dihasilkan akan cenderung lebih mahal berdasarkan mata uang negara lain. Akibatnya, permintaan barang dan jasa ikut menurun dan produsen akan menurunkan pasokannya, menurunnya pasokan akan mengurangi produksi sehingga ekonomi mengalami perlambatan, sehingga kebutuhan dana untuk modal kerja maupun investasi berkurang dan bank akan kesulitan dalam menyalurkan pembiayaan dan sebaliknya.<sup>20</sup>

---

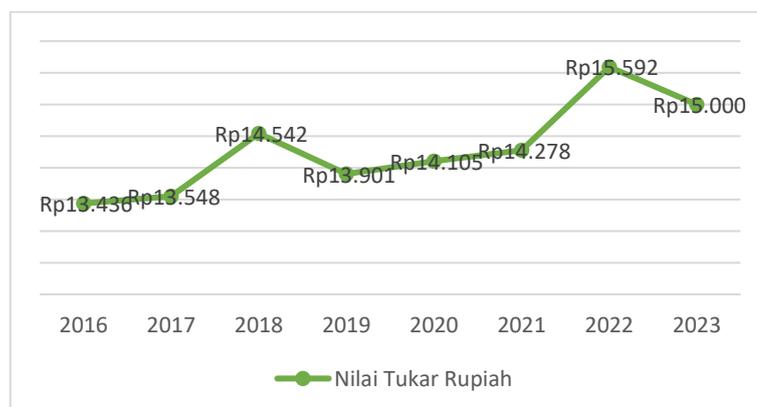
<sup>18</sup> Shamsun Nahar, dan Niluthpaul Sarker, Are Macroeconomic Factors Substantially Influential For Islamic Bank Financing? Cross-Country Evidence. *IOSR Journal of Business and Management*, Vol. 18 No. 06, 2016. hlm. 20-27

<sup>19</sup> Karim, A, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)

<sup>20</sup> Rifai, dkk., "Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekspor terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Dana Pihak Ketiga

Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa variabel makro kurs berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan di masa krisis keuangan pada tahun 2008. Meningkatnya nilai kurs mata uang asing terhadap rupiah mengakibatkan masyarakat cenderung untuk memiliki dolar (menarik dana dan mengkonversikannya dalam bentuk dolar) yang dapat mengakibatkan menurunnya dana rupiah di perbankan, sehingga akan mempengaruhi bank dalam penyaluran pembiayaannya.<sup>21</sup> Hal ini juga menunjukkan kurs rupiah berpengaruh terhadap total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Berikut merupakan data perkembangan kurs rupiah terhadap Dolar Amerika periode 2016-2023:



Sumber: Bank Indonesia, Agustus 2023<sup>22</sup>

**Gambar 1.4**  
**Perkembangan Kurs Rupiah Terhadap USD Periode 2016-2023**

sebagai Variabel Moderating”. *MUQTASID, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 8, 2017, hlm. 18

<sup>21</sup> Haryati, S, “Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia : Intermediasi”, *Journal of Finance and Banking*, Vol. 4 No. 2, 2020, hlm. 179

<sup>22</sup> Bank Indonesia, *Informasi Kurs JISDOR*, <https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/jisdor/Default.aspx>. Diakses 26 Agustus 2026

Berdasarkan gambar 1.4 diperoleh informasi bahwa pada tahun 2016 Kurs Rupiah berada pada nilai Rp13.436 terus naik sampai tahun 2018 menjadi Rp14.542. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp13.901 kemudian naik pada tahun 2020 menjadi Rp14.105. Dan pada tahun 2022 menjadi Rp15.592. Apabila nilai tukar rupiah menguat maka pemasukan bagi hasil akan naik.<sup>23</sup> Hal ini berbanding dengan data pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2019 yang masih mengalami kenaikan.

Selanjutnya, variabel makroekonomi yang perlu diperhatikan adalah Produk Domestik Bruto. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Resti, W, *Analisis Pengaruh BI Rate dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 6

<sup>24</sup> Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Bruto (PDB)*, <https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto.html>, Diakses pada tanggal 13 September 2023

Berikut merupakan data perkembangan PDB di Indonesia periode 2016-2023:



Sumber: Badan Pusat Statistik, Agustus 2023<sup>25</sup>

**Gambar 1.5 PDB Indonesia Periode 2016-2023**

Pada gambar 1.5 memperlihatkan bahwa PDB di Indonesia cenderung mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 sekitar Rp4.018.844,40 menjadi Rp3.931.411,20. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yang dicerminkan oleh tingkat pertumbuhan PDB dapat mendorong permintaan pembiayaan dari individu dan bisnis. Hal ini juga berbanding dengan data pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2020 yang masih mengalami kenaikan.

Dari beberapa riset tentang pengaruh BI 7-Day (*Reverse*) *Repo Rate* (BI7DRR), inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap pembiayaan bagi hasil, menurut Furqonul Haq menyimpulkan bahwa BI 7-Day (*Reverse*) *Repo Rate* (BI7DRR) berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan di Bank Syariah Indonesia.<sup>26</sup> Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Putra Agung Dwijaya menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> Furqonul Haq, Analisis Variabel Makroekonomi (Inflasi dan BI 7-Day Reverse Repo Rate) Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Syarikah*, Vol. 7 No. 1, 2021, hlm. 47

terhadap pembiayaan di bank syariah.<sup>27</sup> Kemudian berdasarkan penelitian Nahar dan Sarker menyimpulkan bahwa PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bank syariah sedangkan penelitian dari Abdul Karim sebaliknya, pertumbuhan PDB di Malaysia berpengaruh positif terhadap pembiayaan bank syariah.<sup>28</sup>

Namun, masih terdapat inkonsistensi dalam riset yang dilakukan oleh Nur Aslami yang menyimpulkan bahwa secara parsial variabel inflasi dan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan di bank syariah.<sup>29</sup> Hal ini juga dikemukakan dalam riset yang dilakukan oleh Putra Agung Dwijaya yang menyimpulkan bahwa variabel tingkat suku bunga acuan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan di bank syariah.<sup>30</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat inkonsistensi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, menarik apabila dilakukan riset terbaru mengenai variabel makroekonomi berupa BI 7-Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR), inflasi, nilai tukar rupiah dan Produk Domestik Bruto terhadap pembiayaan di bank syariah. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Jabar Banten

---

<sup>27</sup> Putra Agung Dwijaya, Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi, Dengan Demografi dan Efek Krisis Keuangan Global Sebagai Variabel Kontrol Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia (Studi Pada Bank Syariah Devisa Di Indonesia Periode 2007-2016), *Diponegoro Journal of Management*, Vol. 7 No. 4, 2018, hlm. 11

<sup>28</sup> Shamsun Nahar, dan Niluthpaul Sarker, Are Macroeconomic Factors Substantially Influential For Islamic Bank Financing? Cross-Country Evidence. *IOSR Journal of Business and Management*..., hlm. 20-27

<sup>29</sup> Aslami, N, Pengaruh Inflasi dan Kurs Terhadap Ujrah Dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pematangsiantar. *Studia Economica, Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1, 2015, hlm. 100

<sup>30</sup> Putra Agung Dwijaya, Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi, Dengan Demografi dan Efek Krisis Keuangan Global Sebagai Variabel Kontrol Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia..., hlm. 11

(BJBS) dengan menggunakan data kurun waktu 8 tahun terakhir yang diawali pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2023.

Alasan penelitian ini dilakukan di Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) selain karena fenomena yang telah dijelaskan di atas terjadi di Bank Jabar Banten Syariah (BJBS). Berdasarkan riset yang dilakukan oleh penulis, penelitian mengenai pengaruh variabel makroekonomi terhadap pembiayaan *musyarakah* belum pernah dilakukan di Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) sebelumnya.

Dilihat dari fenomena yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Determinan Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Jabar Banten Syariah (BJBS): Variabel Makroekonomi Periode 2016-2023”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh BI 7-Day (*Reverse*) *Repo Rate* (BI7DRR) terhadap pembiayaan *musyarakah* Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) periode 2016-2023?
2. Apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap pembiayaan *musyarakah* Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) periode 2016-2023?
3. Apakah terdapat pengaruh nilai tukar rupiah terhadap pembiayaan *musyarakah* Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) periode 2016-2023?
4. Apakah terdapat pengaruh PDB terhadap pembiayaan *musyarakah* Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) periode 2016-2023?

5. Apakah terdapat pengaruh BI *7-Day (Reverse) Repo Rate* (BI7DRR), inflasi, nilai tukar rupiah, dan Produk Domestik Bruto terhadap pembiayaan *musyarakah* Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) periode 2016-2023?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh BI *7-Day (Reverse) Repo Rate* (BI7DRR) terhadap pembiayaan *musyarakah* Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) periode 2016-2023?
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pembiayaan *musyarakah* Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) periode 2016-2023?
3. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah terhadap pembiayaan *musyarakah* Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) periode 2016-2023?
4. Untuk mengetahui pengaruh PDB terhadap pembiayaan *musyarakah* Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) periode 2016-2023?
5. Untuk mengetahui pengaruh BI *7-Day (Reverse) Repo Rate* (BI7DRR), inflasi, nilai tukar rupiah, dan Produk Domestik Bruto terhadap pembiayaan *musyarakah* Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) periode 2016-2023?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti memiliki harapan untuk terealisasinya sebuah karya ilmiah yang bermanfaat untuk para pembaca. Kegunaan yang diharapkan di antaranya:

### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Mengembangkan teori ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan teori ekonomi Islam berkenaan dengan pembiayaan *musyarakah*.
- b. Kontribusi pada pengetahuan akademik. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti dan akademisi yang tertarik pada studi ekonomi Islam berkenaan dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- c. Pengembangan model ekonomi. Penelitian ini dapat membantu pengembangan model ekonomi yang lebih akurat dan relevan.

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Manajemen risiko dan pengambilan keputusan. Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengelola dan mengembangkan strategi manajemen risiko terkait dengan kondisi makroekonomi.
- b. Regulasi dan kebijakan publik, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembuat regulasi dan kebijakan publik untuk dapat memahami dampak kebijakan moneter yang di terapkan pada sektor keuangan syariah.

### 3. Kegunaan Umum

Nasabah lebih memahami bagaimana faktor makroekonomi dapat mempengaruhi pembiayaan. Penelitian ini juga dapat membantu nasabah dalam mengambil keputusan yang bijak.